

Empat Pulau Sah Milik Aceh

Dari Halaman 1

mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumut dan di Aceh," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan berdasarkan dokumen dan data pendukung telah diambil keputusan. Pemerintah mengambil keputusan 4 pulau tersebut sah milik Pemprov Aceh.

"Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen data pendukung, kemudian tadi bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek secara administrasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk wilayah administrasi Aceh," ujarnya.

Empat Pulau, Satu Skandal: Rebutan Wilayah

Dari Halaman 1

kecil, Panjang, Lipan, Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil, kini menjadi simbol betapa mudahnya peta administrasi digeser, diperebutkan, bahkan "diatur ulang" di balik meja kekuasaan.

Namun ini bukan semata konflik Aceh dan Sumut. Ini adalah potret lebih besar, negara seolah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketika batas bisa diubah seperti lembaran anggaran, dan wilayah bisa menjadi alat tukar politik. Kita patut bertanya, apakah negara sedang bingung, atau justru berpura-pura bingung demi skenario kekuasaan tertentu?

Konflik di empat pulau itu bukan satu-satunya. Indonesia menyimpan lebih dari 300 titik konflik batas wilayah antar kabupaten, provinsi, bahkan desa. Beberapa telah berlangsung selama puluhan tahun tanpa penyelesaian. Di Sulawesi Selatan, ada desa yang diklaim dua kabupaten. Di Kalimantan, ada pulau yang tercatat dalam dua provinsi berbeda.

Yang ironis, semua ini terjadi dalam satu negara yang katanya "negara kesatuan." Tapi praktiknya, kepala daerah saling klaim seperti para bangsawan feodal zaman silam. Rebutan wilayah bukan demi pelayanan rakyat, melainkan demi siapa yang berhak memanen anggaran, mengelola proyek, dan mengklaim legitimasi politik.

Apakah ini demi rakyat? Tidak selalu. Karena siapa pun yang menang, kekayaan alam tetap semestinya untuk bangsa, bukan untuk elite daerah. Tapi faktanya, batas diperebutkan justru

Muzakir Manaf: Bendera Aceh Sebentar

Dari Halaman 1

silam dapat segera diizinkan untuk berkibar. "Dalam proses, Insya Allah secepat mungkin," kata pria yang juga dikenal dengan sapaan Mualem itu di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/6).

Dia berada di istana untuk ikut rapat dengan pemerintah pusat terkait polemik empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Presiden RI Prabowo Subianto telah memutuskan empat pulau itu masuk wilayah administratif Aceh.

Adapun perihal pengibar bendera bulan bintang pada aksi damai polemik empat pulau di halaman Kantor Gubernur Aceh kemarin,

Pesawat Saudi Arabian Airlines Diancam Bom

Dari Halaman 1

dalam pesawat Saudi Arabian Airlines.

Pihak bandara kemudian menginformasikan kepada pilot maskapai Saudi Arabian Airlines Nomreg SVA5276 yang sedang melaksanakan penerbangan agar segera melaksanakan divert di bandara Internasional KNO untuk melakukan proses emergency landing berkaitan dengan adanya informasi ancaman bom tersebut.

Adapun data pesawat, type : B-777-3FG (ER), Registrasi HZ-AK32, Rute : Jeddah-Cgk (Divert Kno), No. Penerbangan: SVA5276.

Pukul 10.35 WIB pesawat contact tower Bandara Kualanamu untuk melaksanakan pendaratan darurat. Pukul 10.44 WIB pesawat landing di

Pakistan Bakal 'Turun Tangan'

Dari Halaman 1

Kendati demikian, Asif membantah pernyataan Rezaei mengenai kesediaan Pakistan menyerang Israel dengan senjata nuklir. Dalam pernyataan di media sosial, Asif menyatakan bahwa sikap Pakistan mengenai nuklir sejalan dengan aturan internasional.

Asif menegaskan senjata nuklir Pakistan hanya

Pengacara Tom Lembong Walk Out

Dari Halaman 1

bong digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (17/6/2025). Mulanya, jaksa mengatakan saksi atas nama mantan Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno berhalangan hadir di persidangan hari ini.

Jaksa mengajukan permohonan ke hakim agar keterangan Rini dibacakan dalam persidangan. Namun, tim pengacara Tom menolaknya.

Debat panas antara jaksa dan pengacara Tom pun terjadi terkait pembacaan keterangan Rini tersebut. Pengacara Tom mempertanyakan alasan sah yang dimaksud jaksa karena keterangan Rini ingin dibacakan di persidangan padahal berhalangan hadir.

Ketua majelis hakim Dennie Arsan Fatrika kemudian menengahi perdebatan keduanya. Hakim meminta jaksa menjelaskan alasan Rini berhalangan hadir sebagai saksi dalam sidang hari ini.

"Penuntut umum, tadi kan ada alasan sah. Sahnya tolong dijelaskan, intinya apa?" tanya hakim.

Jaksa mengatakan Rini berhalangan hadir karena memiliki acara keluarga di Jawa Tengah. Pengacara Tom meminta Rini tetap dihadirkan dalam persidangan selanjutnya.

"Dari surat tersebut saksi ada acara keluarga di Jawa Tengah," jawab jaksa.

Empat pulau yang direbutkan itu menjadi polemik karena disebut berada di wilayah Sumut berdasarkan keputusan Kemendagri. Padahal keempat pulau tersebut awalnya merupakan bagian dari wilayah Aceh.

Empat pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Kemendagri ternyata mendukung klaim Gubernur Sumut Bobby Nasution lewat Keputusan Mendagri yang terbit pada 25 April 2025 lalu.

"Proses perubahan status keempat pulau tersebut telah berlangsung sebelum 2022, jauh sebelum Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhullah menjabat. Pada 2022, beberapa kali telah difasilitasi rapat koordinasi dan survei lapangan oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, dalam keterangannya, Senin (26/5).

karena nilai ekonomi yang dikandungnya. Mulai dari izin tambang, pembangunan pelabuhan, hingga potensi kawasan wisata dan investasi.

Pemerintah Pusat, Diam, Bingung, atau Pura-pura?

Yang paling disorot adalah sikap pemerintah pusat yang terkesan ambigu. Berkali-kali hanya mengatakan "masih dikaji", "belum valid", atau "menunggu data geospasial". Padahal negara punya semua perangkat, mulai dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Kemendagri, hingga Perpres Satu Peta.

Mengapa konflik seperti Aceh-Sumut terus berlarut? Ada dua kemungkinan. Pemerintah pusat tidak mampu, atau justru tidak mau menyelesaikannya. Jika tidak mampu, ini kegagalan sistemik. Tapi jika tidak mau, ini lebih berbahaya. Artinya ada skenario kekuasaan yang sedang dijalankan di balik layar.

Konflik sengaja digantung agar bisa dinegosiasikan. Wilayah menjadi barang dagangan politik. Kepastian hukum diperdagangkan untuk konsesi. Jika ini benar, maka kita sedang menyaksikan pengkhianatan atas prinsip negara kesatuan itu sendiri.

Dalam kasus empat pulau, muncul dugaan kuat bahwa ini bagian dari rancang bangun politik dinasti dan penguasaan sumber daya. Ada spekulasi bahwa pengalihan ke Sumut bukan semata soal teknis batas, melainkan strategi penguasaan administratif demi memuluskan proyek besar investasi, wisata, bahkan kawasan ekonomi khusus yang terhubung ke jaringan bisnis tertentu.

Pulau-pulau itu disiapkan untuk menjadi titik

Mualem mengaku tidak tahu. Pasalnya, dalih dia, dalam beberapa hari terakhir berada di Jakarta.

"Saya cek dulu ke sana, karena saya sudah berapa hari ke sini," ujarnya.

Sebelumnya, bendera bulan bintang itu dikibarkan oleh massa aksi di halaman Kantor Gubernur Aceh pada demonstrasi terkait polemik empat pulau.

Bendera bulan bintang sendiri saat ini masih kontroversi pengibarannya meskipun sudah memiliki payung hukum lewat Qanun Nomor 13 Tahun 2013.

Bendera itu masuk dalam salah satu butir-butir MoU Helsinki saat perjanjian damai

Empat Pulau untuk Aceh

Bandara Kualanamu, Medan.

Pukul 11.30 WIB, telah dilakukan proses evakuasi seluruh penumpang untuk diturunkan dari dalam pesawat.

Pukul 11.35 WIB dilaksanakan briefing penangan dipimpin oleh Danlanud Swo. Pukul 11.36 WIB pesawat dilaksanakan pengecekan oleh tim Jihandak dari Polda Sumatera Utara.

Catatan, hingga saat ini para penumpang diamankan di area terminal Bandara internasional KNO.

Pesawat itu membawa penumpang, dan awak kabin dengan total 442 orang. Pilot maskapai Saudi Arabian Airlines Nomreg SVA5276 mengalihkan penerbangan dan melakukan pendaratan darurat. "Jibom Poldas Sumut berkoordinasi dengan

akan digunakan untuk membela keamanan dan wilayahnya sendiri.

"Pakistan sepenuhnya berkomitmen pada semua aturan nuklir internasional," tulis Asif, seperti dikutip Samaa TV.

"Kemampuan nuklir kami semata-mata untuk pertahanan nasional dan kesejahteraan rakyat Pakistan," lanjut dia.

Namun, pada kesempatan itu, Asif juga berpe-

Hakim tak mengabulkan permintaan pengacara Tom dan meminta jaksa tetap bisa membacakan keterangan Rini di persidangan. Pengacara Tom pun memilih walk out dari persidangan.

"Baik gini, intinya majelis sudah mengambil sikap ya. Mohon juga tenang. Majelis sudah mengambil sikap dan kami merasa adalah perlu untuk dibacakan dari permohonan penuntut umum tersebut untuk membacakan keterangan saksi," kata hakim.

"Kalau mau dibacakan, majelis baca sendiri aja. Kami nggak usah hadir di persidangan ini, kalau begitu dalam pembacaan ini kami keluar," timpal pengacara Tom, Ari Yusuf Amir.

"Karena dalam berita acara nanti tentunya akan tercatat atas nama keterangan saksi tersebut dibacakan," ujar hakim.

Pengacara Tom meminta keberatannya dicatat dalam persidangan. Kemudian, tim pengacara Tom keluar dari persidangan.

"Dan tolong diucatkan bahwa di persidangan kami menolak itu," ujar Ari.

Sidang dilanjutkan dengan pembacaan keterangan Rini dalam persidangan. Tom pun mengikuti persidangan tanpa didampingi pengacaranya.

Sementara itu, pengacara Tom, Ari Yusuf Amir menilai pembacaan keterangan saksi yang tidak hadir

Pihak Pemprov Aceh pun tidak menerima keputusan tersebut. Peninjauan ulang keputusan tersebut diperjuangkan Pemprov Aceh. Kemendagri menjelaskan kisruh 4 pulau tersebut bermula dengan adanya perubahan nama pulau yang diajukan Pemprov Aceh pada 2009 silam.

Dirjen Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menyebut pada saat itu, tim nasional pembakuan rupabumi Kemendagri mendapati ada 213 pulau di wilayah Sumut. Dia mengatakan dari jumlah tersebut, termasuk Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang.

"Hasil verifikasi tersebut, mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara, lewat surat nomor sekian, nomor 125, tahun 2009 yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri dari 213 pulau, termasuk empat pulau yang tadi, yang empat pulau itu," jelas Safrizal saat jumpa pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/6). (dtk/jjs)

masuk bagi modal besar. Pemerintah provinsi yang menang klaim akan bisa mengatur izin usaha, proyek infrastruktur, hingga skema kerjasama publik-swasta. Maka tak heran, tarik-menarik wilayah ini begitu sengit karena yang diperebutkan bukan sekadar tanah, melainkan legalitas eksploitasi.

Antara Kepentingan dan Kebangsaan

Jika skenario ini benar atau bahkan hanya separuhnya benar, maka kita sedang menyaksikan praktik perampokan legal atas wilayah republik oleh para elit. Konflik batas bukan lagi urusan hukum, tetapi transaksi kekuasaan. Kepala daerah bertarung bukan demi rakyat, tetapi demi potensi dana dan jaringan bisnis.

Ini logika yang membunuh semangat kebangsaan. Karena di tengah republik, antar pemimpin daerah saling sikut seolah-olah wilayah adalah milik pribadi mereka. Mereka lupa bahwa siapa pun yang menang, hasilnya tetap harus kembali ke rakyat. Kecuali, jika sejak awal memang niatnya bukan untuk rakyat, melainkan untuk memperkaya kelompok sendiri.

Pemerintah pusat harus mengakhiri ketidakjelasan ini. Buka data geospasial secara publik. Jelaskan proses hukum yang terjadi. Jika ada kekeliruan, akui. Jika ada rekayasa politik, bongkar. Jika ada konflik kepentingan, usut.

Negara tidak bisa terus berdiri di tengah dan berpura-pura netral. Karena ketika wilayah dijadikan alat tukar kekuasaan, yang diperlakukan bukan hanya peta tetapi masa depan republik ini.

antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan RI pada 2005 silam.

Merespons pengibar bendera bulan bintang dalam aksi damai itu, Mensesneg Prasetyo Hadi meminta agar isu polemik empat pulau yang kini sudah rampung itu tidak digiring ke isu lainnya.

Ia menyatakan seluruh pihak termasuk Gubernur Sumut dan Aceh menunjukkan sikap negarawan, terbuktil dengan terselesaikannya polemik tersebut.

"Jangan karena ada masalah kemudian isunya digeser kemana-mana nanti terjadi saling gesekan, saling tidak percaya satu sama lain," kata Pras.(cnni/jjs)

TNI sudah turun melakukan screening. Kita sudah mengecek dan screening lah," ujar Kabid Humas Poldas Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan.

Ferry mengungkapkan seluruh penumpang berhasil dievakuasi oleh petugas TNI/Polri dan dibawa ke ruang tunggu kedatangan/keberangkatan Bandara Kualanamu.

"Penumpang sudah berhasil evakuasi," sebutnya.

Disinggung benar teror atau prank?. Ferry enggan berkomentar lebih jauh. Tapi, pihaknya fokus melakukan screening dan mengevakuasi seluruh penumpang pesawat asing itu.

"Apakah itu teror atau prank, itu nomor dua lah. Kita evakuasi dulu seluruh penumpang," pungkas Ferry. (A-10)

san bahwa masyarakat dunia harus memperhatikan kemampuan nuklir Israel yang tak mengikuti kebijakan internasional. Ia memperingatkan bahwa dukungan terhadap Israel akan mengakibatkan "konsekuensi yang menghancurkan."

"Israel tidak menandatangani perjanjian nuklir internasional apa pun. Dunia seharusnya khawatir tentang persenjataan nuklir negara nakal yang beroperasi tanpa pengawasan," ucapnya. (cnni/jjs)

di persidangan tersebut ganjil. Sebab menurutnya berdasarkan Pasal 185 KUHP, keterangan saksi dianggap sah jika disampaikan di persidangan. Sebab di dalam BAP, menurutnya bisa saja dalam prosesnya adanya tekanan.

"Jadi kalau saksi tidak dihadirkan di persidangan, hanya dibacakan, ini bahaya sekali. Bahaya sekali buat keadilan kita. Oleh karena itu, kami menolak tegas saksi yang dibacakan tanpa dihadirkan di persidangan, dan kami, oleh karena hakim tetap memutuskan untuk dibacakan, maka kami walk out, kami izin untuk keluar," kata Ari, ditemui usai walk out.

Sebelumnya, jaksa mengungkap keterlibatan Tom Lembong dalam kasus dugaan impor gula yang merugikan negara Rp 578 miliar. Tom Lembong disebut menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan lembaga terkait.

Tom Lembong pun didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (det/jjs)

Uang Bukan Obat

Dari Halaman 1

kali menunjukkan: integritas tidak sekadar persoalan isi dompet. Ia adalah soal sistem. Dan sistem peradilan kita masih jauh dari kata sehat.

Mari lihat kenyataan di balik toga. Selama ini, proses rekrutmen hakim masih lebih banyak ditentukan oleh koneksi ketimbang kompetensi. Integritas belum menjadi fondasi, sekadar bonus bila ada. Komisi Yudisial yang seharusnya jadi penjaga etika, terbatas wewenangnya. Sementara pengawasan di Mahkamah Agung tak cukup independen untuk mencegah pelanggaran dari dalam. Semua ini menciptakan ruang gelap—tempat di mana mafia hukum bisa tumbuh subur, terlindungi oleh sistem yang permisif.

Marak Jual Beli Perkara

Lalu ada budaya "jual-beli" perkara yang sudah lama jadi rahasia umum. Lobi vonis, intervensi kekuasaan, hingga transaksi keputusan menjadi rutinitas yang nyaris normal. Dalam kondisi seperti ini, vonis yang ringan untuk pelaku korupsi besar atau hukuman berat untuk pelanggaran kecil bisa saja tidak lagi mencerminkan keadilan, tetapi harga.

Selain itu, jangan lupa, beban kerja yang timpang serta fasilitas minim di daerah juga jadi lubang besar dalam integritas. Hakim yang bekerja di bawah tekanan dan serba kekurangan lebih rentan terjebak dalam tawaran "solusi instan".

Apa yang dibutuhkan bukan hanya tambahan rupiah, melainkan reformasi menyeluruh: dari cara hakim dipilih, bagaimana mereka diawasi, hingga bagaimana putusan mereka dipertanggungjawabkan secara publik. Teknologi bisa membantu membuka transparansi proses hukum. Partisipasi masyarakat sipil bisa memperkuat pengawasan. Tapi semua itu hanya mungkin jika ada kemauan politik yang benar-benar serius.

Belajar dari Negara Lain: Gaji Besar Tak Selalu Efektif

Pengalaman Ghana dan Nigeria menjadi cermin. Di sana, aparat hukum digaji tinggi, tapi korupsi tetap hidup karena akuntabilitas lemah dan sistem dibiarkan rusak. Indonesia tentu tak ingin mengulang cerita serupa.

Naikkan gaji hakim? Silakan. Tapi jangan berhenti di sana. Jangan biarkan kebijakan ini menjadi topeng kemewahan yang menutupi wajah peradilan yang sebenarnya masih kusam. Indonesia pun bisa jatuh ke lubang yang sama jika hanya fokus pada nominal tanpa membenahi sistem secara menyeluruh. Gaji besar tanpa reformasi ibarat menuang air ke dalam ember bocor!

Bukan Cuma Soal Gaji, Tapi Soal Keberanian Merombak Sistem

Kenaikan gaji hakim bisa jadi langkah awal yang positif. Tapi kalau sistemnya tetap bobrok, hasilnya hanya jadi perbaikan kulit luar. Selama rekrutmen masih longgar, pengawasan setengah hati, dan budaya suap dibiarkan hidup, mafia peradilan akan tetap punya ruang bernapas.

Membersihkan dunia peradilan tak cukup dengan mengisi dompet. Yang dibutuhkan adalah nyali untuk bersih-bersih sistem: menyuapi praktik busuk, membuka ruang transparansi, dan membangun budaya hukum yang berintegritas.

Sebab pada akhirnya, integritas tak bisa dibeli—ia dibangun, diuji, dan dijaga. (*)



Empat Pulau untuk Aceh

Dari Halaman 1

ini bukan hanya soal garis peta di atas kertas, melainkan menyangkut harga diri daerah, ekonomi perikanan, hingga simbol persatuan nasional. Maka, ketika status pulau itu diputuskan "resmi" masuk ke wilayah Aceh, pertanyaan besar mengemuka: apakah keputusan ini benar-benar final? Dan lebih penting lagi, apakah keputusan ini membawa masalah atau justru bara dalam sekam?

Kita perlu menelusuri akar persoalan ini secara jernih. Sengketanya batas wilayah antardaerah bukan hal baru di Indonesia. Pulau-pulau kecil kerap menjadi objek perebutan karena minimnya data historis, lemahnya pengawasan, serta kompleksnya dinamika lokal. Dalam konteks Aceh-Sumatera Utara, sejarah panjang Aceh sebagai daerah istimewa dengan hak-hak otonomi khusus menambah dimensi sensitif dalam setiap keputusan terkait wilayah.

Pulau-pulau kecil ini strategis secara geografis. Selain sebagai zona penangkapan ikan tradisional masyarakat pesisir, keberadaan pulau tersebut juga menyangkut kepentingan keamanan perbatasan laut dan potensi sumber daya alam di bawah laut. Bagi warga pesisir Sumatera Utara, keberadaan pulau itu bukan sekadar titik di peta, melainkan bagian dari identitas maritim mereka.

Reaksi keras sebagian masyarakat Aceh, termasuk desakan sejumlah tokoh untuk menggugat keputusan pemerintah, memperlihatkan satu hal: nasionalisme daerah kadang bertabrakan dengan nasionalisme negara. Rasa memiliki terhadap tanah air sering dimaknai sempit dalam konteks wilayah administratif provinsi, bukan dalam bingkai kesatuan NKRI secara utuh.

Di sinilah kita perlu berhati-hati. Jangan sampai perbedaan kepentingan administratif ini menjadi bara pemecah persaudaraan. Elite politik di kedua daerah harus menahan diri agar tidak mempolitisasi isu ini demi keuntungan sesaat. Narasi persatuan harus lebih dikedepankan ketimbang narasi "kami yang kehilangan" atau "kami yang meneng".

Keputusan pemerintah memang sah secara hukum. Namun, sah secara hukum tidak selalu sejalan dengan rasa keadilan sosial di mata publik. Maka, langkah selanjutnya harus diisi dengan ruang dialog. Pemerintah pusat bersama kedua provinsi perlu membentuk forum musyawarah yang tidak hanya fokus pada aspek teknis batas wilayah, tetapi juga menyusun skema kerjasama antarwilayah.

Misalnya, bagaimana nelayan dari Sumatera Utara tetap bisa melaut di perairan sekitar pulau tersebut tanpa khawatir dikriminalisasi. Bagaimana pulau-pulau itu dapat dikelola bersama untuk kepentingan ekonomi rakyat kedua provinsi. Bahkan, bagaimana menjadikan pulau itu sebagai simbol perdamaian, bukan perseteruan.

Kasus empat pulau ini menjadi pengingat keras bagi kita semua: tata batas wilayah di Indonesia masih menyimpan banyak pekerjaan rumah. Di era digital saat ini, seharusnya validasi peta wilayah tidak lagi menjadi masalah pelik. Namun faktanya, kita masih terjebak dalam silang sengketa akibat lemahnya basis data, tumpang tindih peraturan, dan seringkali keputusan yang terkesan politis.

Pemerintah pusat harus menjadikan momentum ini sebagai awal pembenahan tata batas nasional, bukan hanya di Aceh dan Sumut, tetapi juga di daerah lain yang potensial memicu konflik. Investasi pada teknologi pemetaan, penguatan regulasi tata batas, dan pembinaan rasa kebangsaan harus berjalan beriringan.

Ke depan, mari kita belajar dari kasus ini. Empat pulau itu bukan hanya milik Aceh. Bukan pula hanya milik Sumatera Utara. Empat pulau itu adalah milik Indonesia. Persatuan dalam keberagaman tidak boleh hanya jadi jargon. Saatnya mewujudkan nilai itu dalam kebijakan publik yang arif, komunikatif, dan berpihak pada rakyat kecil.

Sumatera Utara dan Aceh adalah saudara tua yang sudah berbagi sejarah panjang. Jangan biarkan empat pulau kecil memisahkan persaudaraan itu. Sebaliknya, jadikan ia jembatan emas untuk merawat NKRI yang besar ini.